

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

## **BAB I        PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11

## **BAB II PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA DALAM KITAB HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARANYA**

2.1 Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana .....	2
2.2 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana.....	38
2.2.1 Dasar Hukum Undang-undang Dasar 1945 .....	38
2.2.2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia .....	38
2.2.3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.....	39
2.2.4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.	43
2.3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana.....	45

2.4	Proses Perkara Pidana Masuk Ke Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	47
2.5	Proses Sidang Di Pengadilan.....	48
2.5.1	Dakwaan .....	48
2.5.2	Eksepsi/Tangkisan/Keberatan .....	48
2.5.3	Pemeriksaan Alat Bukti .....	48
2.5.4	Requisitoir/Tuntutan Jaksa .....	49
2.5.5	Pledoi/Pembelaan .....	49
2.5.6	Replik Jaksa Penuntut Umum .....	50
2.5.7	Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum .....	50
2.6	Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri .....	51
2.6.1	Upaya Hukum .....	51
2.6.2	Upaya Hukum Biasa .....	51
2.6.3	Upaya Hukum Luar Biasa .....	51

**BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA YANG DIATUR  
DALAM UNDANG-UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

3.1	Latar Belakang dan Dasar Hukum Dijadikannya Pengadilan Negeri sebagai Lembaga yang Berwenang Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi.....	53
3.2	Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi .....	54

3.3	Latar Belakang dan Dasar Hukum Dijadikannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga yang Berwenang Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi .....	60
3.4	Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi .....	63
3.5	Tata Cara Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan .....	63
3.5.1	Panggilan .....	63
3.5.2	Proses Pemeriksaan Di Depan Sidang Pengadilan Negeri .....	64
3.5.3	Hakim .....	65

**BAB IV ANALISA PERBANDINGAN TERHADAP HUKUM ACARA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI  
SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA UNDANG-UNDANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

4.1	Hukum Acara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Setelah Undang-Undang Pengadilan Tipikor .....	68
4.1.1	Komposisi Hakim .....	68
4.1.2	Jangka Waktu Pemeriksaan .....	68
4.1.3	Penyadapan .....	74
4.1.4	Kedudukan Hasil Penyadapan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	76
4.1.5	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	82
4.1.5.1	Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengadilan Tipikor .....	83
4.1.6	Faktor-faktor penghambat efektivitas Pengadilan Tipikor .....	84
4.1.6.1	Faktor Hukum .....	100

4.6.1.2	Faktor Penegak Hukum .....	86
4.1.6.3	Faktor Sarana dan Prasarana .....	86
4.1.6.4	Faktor Masyarakat .....	86
4.2	Penerapan asas-asas hukum acara pidana dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	86

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan .....	88
Saran .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**